Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
DOI:10.25077/jakp | Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id |

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS MERDEKA DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Suprayitno [1*], Mario Purnama Putra[1], Sri Mujiarti Ulfah[1]
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

[*]suprayitno@fisip.upr.ac.id

Dikirim : 19/08/2022
Diterima : 14/09/2022
Terbit : 27/10/2022

Abstract

Link and match not only with the industrial world but also with a future that is changing so fast. Universities are forced to design and implement innovative learning processes so that students can achieve learning achievements that include aspects of attitudes, knowledge, and skills optimally and always relevant so that the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Regulation no. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards to implement the Merdeka Campus Program policy with the aim of this program being able to develop the capacity of the nation's children in the world of education with 8 (eight) forms of activity in it so that the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia organizes Internship activities at the People's House (MDRR) The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) as a partner of the internship/work practice of the Merdeka Campus Program. The research method used in the descriptive qualitative research method. The results of the study show that the implementation of the independent campus program in internship activities at people's homes at the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia has not been carried out properly. This is based on the existing indicators, related to communication experiencing problems with the lack of maximum communication transmission carried out by the implementer. Resources have not run optimally where the facilities in the Secretariat General of the DPR RI cannot be used optimally, then the independent campus website sometimes experiences system errors. The disposition or attitude of the implementers has not gone well, this is evident in the attitude of the implementers who delay the disbursement of pocket money and incentives as well as the difficulty of converting credits in several university campuses in Indonesia. Then the Standard Operating Procedure, in its implementation there is no SOP that regulates the procedure, but there is an Apprenticeship Curriculum at the People's House of the DPR RI as a reference in its implementation.

Keywords: Implementation;Independent Campus; Internship.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih adaptif dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Negara yang besar dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dinikmati oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu negara juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan dalam suatu negara tersebut. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari zaman klasik hingga modern sekarang yang terus berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan juga selalu berkembang secara dinamis. Namun, tidak ada negara yang berkembang secara dinamis tanpa proses, gerakan, dan perkembangan pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar suatu bangsa, begitu juga dengan bangsa Indonesia sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan dari Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Tuntutan akan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas hari ini merupakan bagian dari tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) Republik Indonesia pada 29 september 2021 di ruangan rapat KK II DPR RI Gedung Nusantara dalam kesempatan pembukaan kegiatan magang di rumah rakyat program kampus merdeka bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan teknologi yang pesat dan dunia kerja, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri tetapi juga dengan masa depan yang berubah begitu cepat. Perguruan Tinggi dipaksa untuk bisa merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Dilatarbelakangi hal tersebut Kemendikbud (saat ini kemendikbud ristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk memperkuat kebijakan program Kampus Merdeka. Dalam program kampus merdeka mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan

dan talentanya agar menjadi profesional dalam suatu bidang (Hasanah & Hendra, 2022). Dengan adanya program kampus merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan dan kebutuhan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan teknologi yang pesat dan dunia kerja. Bentuk kegiatan dalam program Kampus Merdeka meliputi delapan kegiatan yang terdiri dari, pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) adalah untuk meningkatkan keselarasan antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan (Pohan & Kisman, 2022). Menurut Susilawati dalam Arsyad & Widuhung (2022) Konsep utama dari kegiatan ini adalah kebebasan belajar. Mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperkaya wawasan dan kompetensi, meningkatkan kemampuan hard skill maupun soft skills, berinteraksi dengan dunia nyata; dengan akses pembelajaran yang lebih luas, tidak terbatas hanya di ruang kelas, namun juga di perguruan tinggi lainnya, desa, masyarakat, pusat riset industri, dan tempat pengabdian lainnya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memuat kebijakan dan arahan pendidikan nasional, mengubah paradigma pendidikan kompetitif menjadi kolaboratif (Sari dkk, 2021). Dengan adanya kebijakan MBKM, program studi apat lebih memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang dan studi independen. Program studi dapat memberikan penyetaraan kegiatan menjadi bobot 20 sks untuk kegiatan yang memenuhi ketentuan jam kegiatan, yang sebelumnya hanya disetarakan maksimal 12 sks (Arisandi dkk, 2022)

Salah satu mitra kemendikbud ristek dalam implementasi program kampus merdeka merdeka belajar yaitu Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perdana menyelenggarakan kegiatan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 2021 sampai dengan 23 Desember 2021. Sebagai mitra dari magang/praktek kerja Program Kampus Merdeka, Setjen DPR RI memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan semua program studi di seluruh Indonesia untuk mengenal lebih dekat DPR RI dalam kegiatan Magang di Rumah Rakyat yang bertujuan memberikan kesempatan kepada anak bangsa dalam pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata dan dinamika lapangan yang diwujudkan melalui kemampuan

menyelesaikan permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan penerapannya. Dengan adanya magang mahasiswa akan mendapatkan beberapa dampak positif diantaranya adalah keberlanjutan karier, keterlibatan langsung dalam pengalaman kerja, dan membangun/memperkuat relasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Merdeka Belajar — Kampus Merdeka dengan Rektor Universitas Cenderawasih, Rektor Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Syiah Kuala, dan Rektor Universitas Sam Ratulangi bersama Komisi X (sepuluh) DPR RI, Kamis, 30 September 2021 di ruang rapat Komisi X DPR RI di temukan beberapa persoalan-persoalan dalam penyampaian rapat tersebut salah satunya terkait Magang Kampus Merdeka seperti, kesulitan konversi SKS, keterlambatan pencairan uang saku dan terkait regulasi dalam program kampus merdeka. Apakah selama pelaksanaan kegiatan Magang di Rumah Rakat DPR RI sebagai mitra dari program Magang Kampus Merdeka mengalami persoalan-persoalan seperti yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat Panja Kampus Merdeka bersama Komisi X DPR RI.

Untuk menjalankan implementasi kebijakan dengan optimal di harapkan model George C. Edwards III dapat berjalan dengan kondisi dari beberapa indikator yang ada di dalamnya yaitu, syarat pertama bahwa komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya, komunikasi diperlukan agar pengambil keputusan dan pelaksana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Syarat kedua sumber daya yang diperlukan dalam implementasi yakni staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan, Informasi yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan dan fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Syarat ketiga bahwa disposisi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Syarat keempat Struktur birokrasi adalah sebuah mekanisme kerja yang dibuat untuk mengelola pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini maka perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi atau lembaga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif karena dinilai sesuai dengan tujuan dari penelitian ini sendiri yang berusaha untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi dari program Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh berkaitan dengan proses implementasi program kampus merdeka studi kasus magang di rumah rakyat di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut Muhadjir (2000 :142) “Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai teman bagi orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

George C.Edward III dalam Agustino (2014:150) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan pertanyaan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Keseluruhan indikator saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Sehingga itu yang menjadi kerangka teori peneliti terhadap penelitian dari Implementasi Program Kampus Merdeka Kegiatan Magang di Rumah Rakyat di Sekretariat Jenderal DPR RI ke empat indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Indikator pertama, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut George Charles Edward III dalam persyaratan pertama bagi komunikasi yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yaitu: transformasi (transmisi) Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Kejelasan (clarity) menghendaki petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima oleh pelaksana kebijakan namun informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami, untuk menghindari kesalahan interpretasi konsistensi (consistency) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka informasi perintah-perintah yang disampaikan harus konsisten dan jelas. Serta perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah kebijakan yang lainnya. berdasarkan indikator komunikasi ditemukan komunikasi diantara Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Mahasiswa dalam pelaksanaannya berjalan kurang maksimal memang Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan komunikasi berupa sosialisasi melalui media sosial berupa website, instagram, twitter, facebook, whatsapp, telegram dan youtube kepada universitas-universitas dan mahasiswa di Indonesia dengan indikatornya dapat dilihat ditemukan sebanyak 17.000 pendaftar dengan kuota hanya 200 orang kepada universitas-universitas dan mahasiswa. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa komunikasi implementasinya berjalan dengan baik seperti dalam segi transmisi komunikasi yang dilakukan kurang maksimal dimana ditemukan bahwasanya terdapat Universitas atau Program Studi tidak memperoleh komunikasi berupa sosialisasi terkait akan pelaksanaan program kampus merdeka kegiatan Magang di Rumah Rakyat DPR RI dan komunikasi di awal yang dilakukan untuk melaksanakan magang kampus merdeka di DPR RI sebagai mitra terlihat diberikan waktu yang sangat singkat kurang lebih hanya satu bulan untuk mempersiapkan kegiatan Magang di Rumah Rakyat DPR RI program kampus merdeka hal ini membuat tim pokja DPR RI bekerja ekstra untuk mempersiapkan kegiatan ini. Konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan magang di rumah rakyat DPR RI ini termanifestasi dalam hal koordinasi yang dilakukan oleh pihak kemendikbud kampus merdeka dengan pihak sekretariat jenderal DPR RI dan Universitas di Indonesia yang baru terlihat di pertengahan pelaksanaanya.

Sehingga Komunikasi dalam pelaksanaan magang di rumah rakyat DPR RI program kampus merdeka belum berjalan secara maksimal dimana ditemukan kendala-kendala dan tantangan dalam implementasinya seperti komunikasi di awal terkait persiapan yang berjalan dengan sangat singkat serta beberapa universitas yang tidak memperoleh komunikasi terkait akan

adanya pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetapi berjalannya kegiatan dan sampai berakhir komunikasi ini berjalan dengan cukup baik diantara Kemendikbud, Sekretariat Jenderal DPR RI, Universitas dan mahasiswa peserta magang.

Indikator kedua, terdapat indikator sumber daya untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi dan dalam penelitian ini terdapat dua faktor sumber daya sebagai analisis dalam pembahasan ini yakni, Sumber daya manusia dan Fasilitas (Facility). Sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya merupakan unsur terpenting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas berkaitan dengan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan.

Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan magang di rumah rakyat DPR RI memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing terutama mentor, tim kelompok kerja dan tim pendukung di berbagai bidang serta tem kampus merdeka dari perguruan tinggi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan magang di rumah rakyat DPR RI program kampus merdeka.

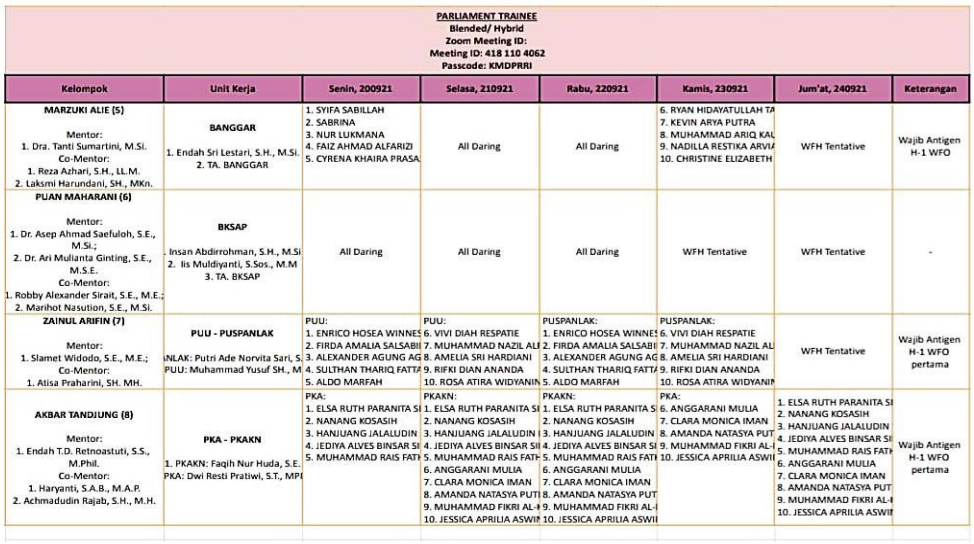
Terkait sumber daya fisik terdapat ketidak keefektifan dalam implementasinya yakni terdapat kekurangan ruangan-ruangan yang di gunakan untuk mahasiswa selaku peserta magang di rumah rakyat DPR RI, dimana ruangan-ruangan dalam kompleks parlemen terutama ruangan-ruangan rapat sering digunakan oleh pihak lembaga DPR RI itu sendiri dan situasi pandemic covid-19 sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan maksimal untuk melaksanakan kegiatan magang secara full offline atau hadir secara fisik dari awal pelaksanaan magang dan sampai berakhirnya kegiatan tersebut.

Sumber daya pendukung lainnya yakni sumber daya digital, untuk di lingkungan DPR RI sumber daya digital sudah cukup memadai dimana terdapat perpustakaan digital, jaringan internet yang baik dan ketersediaan wifi gratis yang dapat digunakan akan tetapi ditemukannya website kampus merdeka yang tidak berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan magang di rumah rakyat DPR RI program kampus merdeka ini terbukti ketika sistem tersebut mengalami error system ketika peserta magang sudah mengisi laporan harian dan mingguan kemudian mentor juga sudah mencentang atau menerima laporan harian dan laporan mingguannya tapi tiba-tiba tidak teridentifikasi dalam website kampus merdeka serta beberapa fitur di dalam website kampus merdeka yang masih kurang mendukung dalam menunjang pelaksanaan program kampus merdeka seperti tidak ada fitur untuk mengupload dokumentasi seperti foto dan video dalam logbook (laporan harian) peserta magang.

Sehingga sumber daya yang dimiliki belum berjalan secara maksimal dimana dalam segi sumber daya manusia saja yang berjalan dengan sangat baik akan tetapi dalam hal sumber daya

fisik dan digital mengalami kendala yang berdampak pada implementasi kegiatan yang kurang berjalan secara maksimal.

Gambar 1. Jadwal Mingguan Shift Magang



PARLIAMENT TRAINEE
Blended/ Hybrid
Zoom Meeting ID:
Meeting ID: 418 110 4062
Passcode: KMDPRRI

Kelompok	Unit Kerja	Senin, 200921	Selasa, 210921	Rabu, 220921	Kamis, 230921	Jum'at, 240921	Keterangan
MARZUKI ALIE (5) Mentor: 1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Co-Mentor: 1. Reza Azhari, S.H., LL.M. 2. Laksmi Harundani, SH., MKn.	**BANGGAR** 1. Endah Sri Lestari, S.H., M.Si 2. TA. BANGGAR	1. SYIFA SABILLAH 2. SABRINA 3. NUR LUKMANA 4. FAIZ AHMAD ALFARIZI 5. CYRENA KHAIRA PRASA	All Daring	All Daring	6. RYAN HIDAYATULLAH TA 7. KEVIN ARYA PUTRA 8. MUHAMMAD ARIQ KAU 9. NADILLA RESTIKA ARVIA 10. CHRISTINE ELIZABETH	WFH Tentative	Wajib Antigen H-1 WFO
PUAN MAHARANI (6) Mentor: 1. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.; 2. Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. Co-Mentor: 1. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.; 2. Marihot Nasution, S.E., M.Si.	**BKSAP** . Insan Abdirrohman, S.H., M.Si 2. Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M 3. TA. BKSAP	All Daring	All Daring	All Daring	WFH Tentative	WFH Tentative	-
ZAINUL ARIFIN (7) Mentor: 1. Slamet Widodo, S.E., M.E.; Co-Mentor: 1. Atisa Praharini, SH. MH.	**PUU - PUSPANLAK** INLAK: Putri Ade Norvita Sari, S. PUU: Muhammad Yusuf SH., M	PUU: 1. ENRICO HOSEA WINNES 2. FIRDA AMALIA SALSABII 3. ALEXANDER AGUNG AG 4. SULTHAN THARIQ FATTA 5. ALDO MARFAH	PUU: 6. VIVI DIAH RESPATIE 7. MUHAMMAD NAZIL ALI 8. AMELIA SRI HARDIANI 9. RIFKI DIAN ANANDA 10. ROSA ATIRA WIDYANIN	PUSPANLAK: 1. ENRICO HOSEA WINNES 2. FIRDA AMALIA SALSABII 3. ALEXANDER AGUNG AG 4. SULTHAN THARIQ FATTA 5. ALDO MARFAH	PUSPANLAK: 6. VIVI DIAH RESPATIE 7. MUHAMMAD NAZIL ALI 8. AMELIA SRI HARDIANI 9. RIFKI DIAN ANANDA 10. ROSA ATIRA WIDYANIN	WFH Tentative	Wajib Antigen H-1 WFO pertama
AKBAR TANDJUNG (8) Mentor: 1. Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil. Co-Mentor: 1. Haryanti, S.A.B., M.A.P. 2. Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	**PKA - PKAKN** 1. PKAKN: Faqih Nur Huda, S.E. PKA: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPI	PKA: 1. ELSA RUTH PARANITA SI 2. NANANG KOSASIH 3. HANJUANG JALALUDIN 4. JEDIYA ALVES BINSAR SI 5. MUHAMMAD RAIS FATH	PKAKN: 1. ELSA RUTH PARANITA SI 2. NANANG KOSASIH 3. HANJUANG JALALUDIN 4. JEDIYA ALVES BINSAR SI 5. MUHAMMAD RAIS FATH 6. ANGGARANI MULIA 7. CLARA MONICA IMAN 8. AMANDA NATASYA PUTI 9. MUHAMMAD FIKRI AL-H 10. JESSICA APRILIA ASWI	PKAKN: 1. ELSA RUTH PARANITA SI 2. NANANG KOSASIH 3. HANJUANG JALALUDIN 4. JEDIYA ALVES BINSAR SI 5. MUHAMMAD RAIS FATH 6. ANGGARANI MULIA 7. CLARA MONICA IMAN 8. AMANDA NATASYA PUT 9. MUHAMMAD FIKRI AL-H 10. JESSICA APRILIA ASWI	PKA: 6. ANGGARANI MULIA 7. CLARA MONICA IMAN 8. AMANDA NATASYA PUT 9. MUHAMMAD FIKRI AL-H 10. JESSICA APRILIA ASWI	1. ELSA RUTH PARANITA SI 2. NANANG KOSASIH 3. HANJUANG JALALUDIN 4. JEDIYA ALVES BINSAR SI 5. MUHAMMAD RAIS FATH 6. ANGGARANI MULIA 7. CLARA MONICA IMAN 8. AMANDA NATASYA PUT 9. MUHAMMAD FIKRI AL-H 10. JESSICA APRILIA ASWI	Wajib Antigen H-1 WFO pertama

Sumber: Arsip Tim Pokja Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2021

Sumber daya yang dimiliki belum berjalan secara maksimal dimana dalam segi sumber daya manusia saja yang berjalan dengan sangat baik akan tetapi dalam hal sumber daya fisik dan digital mengalami kendala yang berdampak pada implementasi kegiatan yang kurang berjalan secara maksimal.

Indikator Ketiga, disposisi itu adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti mendukung, komitmen, acuh tak acuh bahkan dapat juga menolak kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan perlu didukung juga oleh insentif yang memadai. Menurut George C. Edward III dalam Santosa, (2008) salah satu factoryang berperan penting dalam implementasi sebuah kebijakan publik adalah Dispo sisi. Implementasi akan berjalan efektif apabila implementor dari kebijakan tersebut memiliki komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Berdasarkan indikator sikap pelaksana ditemukan bahwasanya pelaksana memberikan informasi diawal yang disampaikan untuk oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI kepada mahasiswa peserta magang terdapat ketidakjelasan terkait kapan secara teknis pelaksanaan magang tersebut dilaksanakan dan berakhir sampai kapan ini terbukti ketika di dalam website kampus merdeka disampaikan pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 dan berakhir pada bulan februari 2022 akan ketika mendekati beberapa hari pelaksanaan terjadi perubahan waktu dalam pelaksanaannya yakni pada tanggal 1 September 2021 dan berakhir pada 23 Desember 2021. Kemudian terjadi keterlambatan pencairan uang saku bagi mahasiswa

peserta magang dan terjadinya penunggakan pembayaran insentif bagi mentor-mentor kelompok peserta magang sampai pada bulan maret tahun 2022 yakni masih ada 3 bulan insentif yang masih belum dibayarkan oleh pihak kemendikbud ristek. Konversi 20 SKS yang dilakukan juga masih bermasalah dalam implementasinya dimana beberapa perguruan tinggi yang tidak menerima untuk melakukan konversi magang terhadap mata kuliah mahasiswa seperti mahasiswa di program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Diponegoro yang tidak menerima konversi 20 SKS program kampus merdeka.

Sikap pelaksana dari pihak Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai mitra program magang kampus merdeka sudah melaksanakan secara baik dan maksimal akan tetapi program ini melibatkan stakeholder-stakeholder yakni Kemendikbud dan kampus mahasiswa peserta magang di mana sikap pelaksana mereka dalam proses implementasinya tidak berjalan dengan baik ini ditemukannya kendala yakni keterlambatan pencairan uang saku dan kesulitan melakukan konversi sks.

Indikator keempat, Struktur Birokrasi *(Standard Operating Procedure)* George Charles Edward III mengatakan struktur birokrasi ialah salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting untuk mengkaji implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang sering disebut sebagai *standard operational procedure* (SOP). Berdasarkan indikator standard operational procedure (SOP) bahwasanya dalam pelaksanaan magang di rumah rakyat DPR RI program kampus merdeka tidak terdapat SOP untuk menunjang implementasinya dikarenakan keterbatasan waktu di awal pelaksanaan untuk menyusun SOP mengingat seperti yang disampaikan oleh Bapak Indra Cakra Buana, M.Si selaku koordinator Tim Kelompok Kerja (POKJA) Magang di Rumah Rakyat DPR RI kurangnya waktu persiapan untuk mempersiapkan SOP mengingat untuk membuat SOP membutuhkan serangkai waktu yang cukup panjang sehingga tidak bisa hanya dengan waktu satu bulan untuk membuat SOP tersebut.

Akan tetapi terdapat buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka dan kurikulum magang di rumah rakyat DPR RI 2021 yang digunakan sebagai acuan atau dasar secara teknis di lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan magang di rumah rakyat DPR RI program kampus merdeka. Kemudian buku panduan kampus merdeka dan kurikulum magang di rumah rakyat DPR RI dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan prosedur yang sudah di tetapkan mulai dari awal kegiatan pada 1 September 2021 sampai dengan berakhirnya kegiatan pada tanggal 23 Desember 2021.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ada di jelaskan terkait Implementasi Program Kampus Merdeka Studi Kasus Magang di Rumah Rakyat di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari analisa teori yang peneliti gunakan yaitu belum terlaksana dengan maksimal, karena idealnya implementasi sebuah kebijakan dan program akan berhasil jika 4 indikator dari teori George Charles Edwards III dapat terlaksana dengan baik. Hal itu didasari dari indikator-indikator yang ada pertama terkait komunikasi belum terlaksana dengan baik dengan kurang maksimalnya dalam hal transmisi komunikasi dalam pelaksanaannya dengan beberapa stakeholder.

Kedua indikator sumber daya belum berjalan dengan maksimal dimana fasilitas di dalam ruangan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat digunakan secara maksimal kemudian website kampus merdeka yang terkadang mengalami eror sistem dan hanya sumber daya manusia saja yang berjalan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Magang di Rumah Rakyat DPR RI. Berdasarkan indikator ketiga yakni disposisi atau sikap pelaksana belum berjalan dengan baik ini terbukti dalam sikap implementor yang melakukan keterlambatan pencairan uang saku dan insentif serta kesulitan konversi SKS di beberapa kampus perguruan tinggi di Indonesia.

Terakhir yakni keempat terkait indikator struktur birokrasi atau dalam hal ini Standard Operating Procedure (SOP) maka dalam pelaksanaan kegiatan Magang Magang di Rumah Rakyat DPR RI tidak terdapat SOP yang mengatur secara prosedur akan tetapi terdapat Kurikulum Magang di Rumah Rakyat DPR RI sebagai acuan dalam pelaksanaannya dan selama pelaksanaan Magang dari tanggal 1 September 2021 sampai berakhir pada 23 Desember 2021 Kurikulum Magang di Rumah Rakyat DPR RI sudah berjalan dengan semestinya yang diharapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Arisandi, Desi., Maitry, W.M & Vini, C.M. 2022. *Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Magang Dan Studi Independen Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. 6(1). 174-181. https://doi.org/10.24912/ jmishumsen. v6i1.16163

Arsyad, Aisyah Tiar & Sisca Debyola Widuhung. Dampak Merdeka Belajar Terhadap Kualitas Mahasiswa. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3(2). DOI http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v3i2.1027

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.* Edisi ke satu Cetakan ke-1 Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.

Eri Barlian. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Padang: Sukanina Press.*Governance*''. Bandung : Refika Aditama.

Hasanah, Rizqita Ayu & Hendra Wijayanto. 2022. *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di PT. Progate Global Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. 7(5). 6585-6596

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id

https://www.dpr.go.id

Maleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT.Remaja

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Rake Sarasih

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*, (2020)

Pohan, Fanny Suzuda & Zainul Kisman. 2022. *Dampak Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Trilogi (Studi Kasus : Prodi Manajemen)*. Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah.,7(2), 307-314

Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik „''Teori dan Aplikasi Good*

Sari, dkk. 2021. *Dampak Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Komputer Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai.,5(3). 10303-10313

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung

Syamsuadi Amir, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrab pada Program Magang Mahasiswa. Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan. 4(1), 1341-1348.

Y. Abdoellah Awan dan Rusfiana Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta

Yuwono Cahyo, dkk. 2021. Implementasi KKN Kampus Merdeka Pada Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021, 1, 42-48